

SIGNIFIKANSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL TERHADAP KELOMPOK MINORITAS

Rahmawaty Rahim

IAIN Raden Fatah Palembang
rahimrahmawati@yahoo.com

Abstract

Indonesia as a nation of unity in diversity, composed of various ethnic groups, cultures, religions, social strata and others, is of course, in the hope of harmony within diversities in all terms of religion, politics, security, social class and as well as in education in order to create state social justice and welfare as a reflection of the Pancasila state basis. One way to achieve the above dream is through multicultural education, as a means of building tolerance of ethnic diversity, cultural, and religion and social strata of the nation, because multicultural education is a response to the diversity of school population growth, as the demand of equal rights for every group. While in the wider sense, multicultural education includes all students regardless of their groups of origins such as religion, gender, ethnic, racial, and cultural, and social strata. Ideally, however, the concept of multicultural education, is not solely directed to the areas of race, religion, and culture. Such a focus once had been an emphasis of intercultural education that emphasizes improved understanding and tolerance of individuals who come from minority groups integrated into the community of majority. Multicultural education is actually an attitude of “caring” and willing to understand the discrepancy (difference) or the “politics of recognition”; political recognition of the existence of the people from minority groups in all cases and concerns to achieve unity in diversity.

Abstrak

Bangsa Indonesia sebagai negara Bhineka Tunggal Ika yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, agama, strata sosial dan lain-lainnya, tentunya sangat mendambakan keserasian dalam perbedaan-perbedaan baik dalam hal agama, politik, keamanan, strata sosial maupun pendidikan dalam upaya menciptakan negara dan bangsa yang berkeadilan sosial sebagai cerminan dari dasar negara Pancasila. Salah satu jalan untuk mencapai dambaan di atas adalah melalui

pendidikan multikultural, sebagai sarana membangun toleransi atas keragaman etnik, budaya, dan agama serta strata sosial dari masyarakat suatu bangsa, karena pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Sedangkan secara luas pendidikan multikultural itu mencakup seluruh peserta didik tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti agama, gender, etnis, ras, dan budaya, serta strata sosial. Idealnya konsep pendidikan multikultural, tidak hanya semata-mata diarahkan pada wilayah ras, agama, dan kultur. Fokus demikian ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mayoritas. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti terhadap perbedaan (*difference*) atau “*politics of recognition*”; politik pengakuan terhadap eksistensi orang-orang dari kelompok minoritas dalam segala hal untuk mencapai persatuan dalam perbedaan.

Kata Kunci: etnisitas, minoritas, diskriminasi, multikulturalisme.

A. Pendahuluan

Ke-Bhineka Tunggal Ika-an merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui, Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau terbesar di dunia, mencapai 17, 667 pulau besar dan pulau kecil. Karena itu wajar kalau dikatakan kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa dielakkan, sekaligus anugerah Yang Mahakuasa.¹ Kenyataan menunjukkan terdapat 350 kelompok etnis, adat tradisi, dan cara-cara sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu, namun setiap warga negara Indonesia berbicara dalam satu bahasa nasional.

Ali Maksum menggambarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk atau pluralis. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu horizontal dan vertikal. Dalam perspektif horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, pakaian, makanan dan budayanya. Sedangkan dalam perspektif vertikal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan tingkat

¹ Choirul Mahpud, *Pendidikan Multikultural*. cet. ke-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 184.

pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya.²

Mengutip Usman Pelly, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki insan Indonesia guna saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah.³ Namun, di samping menjadi kebanggaan, keragaman bangsa Indonesia juga menjadi tantangan sekaligus ancaman; belum semuaarganya bisa menerima gagasan tentang sebuah tatanan multikultural. Munculnya keterbukaan politik saat ini, setelah selama lebih dari tiga dekade hidup dalam otoritarianisme, justru menjadi salah satu pintu masuk bagi berlangsungnya bermacam-macam proses penguatan politik identitas di banyak tempat. Lebih dari sekedar bentuk-bentuk euforia politik setelah lepas dari otoritarianisme, kecenderungan politisasi identitas etnik dan agama yang sekarang terjadi di beberapa daerah sampai pada level ketika kebersamaan sebagai sebuah bangsa mulai dipertaruhkan. Beberapa tendensi formalisasi agama melalui kebijakan publik dalam label peraturan daerah, misalnya, mengundang resiko dilanggarnya *the lowest common denominator* yang sudah disepakati bersama sejak Indonesia meraih kemerdekaan dari kolonialisme tahun 1945 yang lalu, yakni fundamen bahwa Indonesia bukanlah negara yang didasarkan pada satu agama tertentu.

Berbagai fenomena kegaduhan dan kekerasan (utamanya terhadap golongan minoritas) yang merebak di banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjadi *alarm* akan adanya krisis multidimensi sebagai “bayangan depan cermin” kemajemukan yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia yang plural dan multikultur.

Guna menghadapi berbagai gejala dan realitas kekinian bangsa Indonesia yang mengancam paradigma ke-Bhineka Tungga Ika-an, diperlukan terobosan pemikiran mengenai

² Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal* (Yogyakarta: IRCICOD, 2004), h. 190.

³ Usman Pelly, *Kualitas Bermasyarakat: Sebuah Studi Peranan Etnis dan Pendidikan dalam Kereserian Sosial* (Medan: Proyek Kerjasama Kantor Meneg KLH-IKIP Medan, 1988), h. 13.

konsep pendidikan yang mampu memberdayakan manusia dan masyarakat dengan perbedaan yang dimiliki. Dengan bahasa lain, konsep pendidikan tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan mendesak bangsa Indonesia saat ini untuk merekonstruksi kembali “kebudayaan nasional Indonesia” yang terdiri dari keragaman etnis dan budaya tersebut. Dalam konteks ini, konsep pendidikan multikultural bisa menjadi alternatif mengingat pendidikan multikultural melihat masyarakat secara luas dari keberbedaan yang dimiliki. Paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Pada bulan Oktober 1994 UNESCO merekomendasi ide pendidikan multikulturalisme menjadi komitmen global. Rekomendasi itu di antaranya memuat empat pesan. *Pertama*, pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. *Kedua*, pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkuat perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi dan masyarakat. *Ketiga*, pendidikan hendaknya meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan.

Tulisan ini hendak menyorot, apa yang dimaksud dengan pendidikan multikulturalisme? dan apa pula yang dimaksud dengan kelompok minoritas? Serta bagaimana signifikansi dari pendidikan multikultural bagi kelompok minoritas di Indonesia?

B. Membedah Konsep Multikulturalisme

Secara etimologis multikulturalisme marak digunakan pada tahun 1950-an. Sedangkan kerangka konseptual tentang masyarakat multikulturalisme tidak terlalu baru di Indonesia, sebab prinsip negara Indonesia adalah sebagai negara “Bhinneka Tunggal Ika” yang mencerminkan bahwa meskipun Indonesia

adalah negara terdiri dari berbagai sukubangsa, etnis dan agama, tetapi terintegrasi dalam ikatan keikaan, kesatuan”.⁴

Multikulturalisme berasal dari akar kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (aliran/paham). Secara hakiki dalam kata ini terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan.⁵

Bloom sebagaimana kutip Atmadja, menjelaskan bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.⁶ Artinya, meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.⁷

Menurut Sosiolog Universitas Indonesia Parsudi Suparlan, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya, atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat.⁸ Multikulturalisme akan menjadi pengikat dan

⁴Azyumardi Azra, “Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia”, <http://www.kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>. (Diakses 20 April 2012).

⁵Choirul Mahpud, *Pendidikan*, h. 75.

⁶Nengah Bawa Atmadja, “Multikulturalisme dalam Perspektif Filsafat Hindu”, *Makalah* pada Seminar Damai dalam Perbedaan, Singaraja, 5 Maret 2003.

⁷Ernie Isis Aisyah Amini, *Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi pada Siswa SLTP di Kota Mataram*, (Mataram: Program Pascasarjana IKIP Negeri Singaraja, 2004). h. 31-32.

⁸Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, *Makalah* pada Simposium internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3. Universitas Udayana Denpasar Bali, 2002.

jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kebangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultural.

Konsep multikulturalis mengupas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, hak asasi manusia, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat serta mutu produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang lebih relevan. Konsep ini senada dengan apa yang dikemukakan Bloom bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.⁹ Artinya, meliputi sebuah penilaian terhadap kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.¹⁰

C. Pendidikan Multikultural: Konsepsi, Tujuan, Strategi, Model dan Pendekatan

1. Konsepsi Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural bisa didefinisikan sebagai pendidikan untuk (tentang) keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Andersen dan Cusher, dalam Choirul Mahpud, yang menjelaskan pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan.

Sedangkan James Banks menjelaskan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of colour*; maksudnya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai suatu keniscayaan karenanya pendidikan multikultural adalah sunatullah dan anugerah Yang Maha Kuasa. Selanjutnya bagaimana agar perbedaan-perbedaan tersebut mampu disikapi

⁹ *Ibid.*, h. 2.

¹⁰ Amini, *Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural*, h. 32.

dengan semangat egaliter dan penuh toleransi.¹¹

Secara sederhana Muhaemin el-Ma'hady dalam Choirul Mahpud, menjelaskan pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan mengenai keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural dari suatu masyarakat tertentu.¹² Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan multikultural adalah sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupannya tanpa membedakan ras, etnik, agama dan strata sosial.

Selanjutnya M. Ainul Yaqin secara lebih spesifik menjelaskan bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada peserta didik, seperti perbedaan agama, etnis, bahasa, gender, kelas sosial, kemampuan dan usia agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan mudah.¹³

Simpul kata, istilah pendidikan multikultural menggambarkan isu-isu dan problematika pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakan dan strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks deskriptif ini, kurikulum pendidikan multikultural haruslah meliputi toleransi, tema-tema tentang perbedaan etno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, multikulturalisme, kemanusiaan universal dan subjek-subjek lainnya yang relevan.

Semua ini menunjukkan bahwa keragaman kultur mengandung unsur keragaman yang sarat dengan nilai-nilai kearifan. *Pertama*, nilai-nilai kearifan yang dalam hal ini "kearifan sosial" dan "kearifan budaya" dapat dijadikan sebagai tali pengikat dalam upaya bersosialisasi dan berinteraksi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok dan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok

¹¹ Choirul Mahpud, *Pendidikan*, h.175-176.

¹² *Ibid*, h. 176.

¹³ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Under Standing untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 25.

masyarakat yang lain. Melalui nilai "kearifan sosial" dan "kearifan budaya", akan berusaha mengeliminir berbagai bentuk perselisihan dan konflik budaya, konflik agama yang kurang kondusif antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas.

Kedua, nilai saling hormat menghormati. Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang multikultural akan terwujud dalam perilaku yang saling menghormati, antar individu, antar kelompok, antar agama, antar kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas.

Ketiga, nilai saling menghargai perbedaan keanekaragaman kebudayaan, keanekaragaman agama dan keanekaragaman kepercayaan, keanekaragaman suku serta keanekaragaman kelompok, keanekaragaman strata sosial dalam kesederajatan dan saling menjaga satu dengan lainnya dalam prinsip-prinsip perbedaan tersebut.

Keempat, nilai kearifan akhlak sebagai dampak dari adanya saling menghormati dan saling menghargai antarindividu dan antarkelompok yang berbeda agama, berbeda kepercayaan, berbeda suku dan berbeda kelompok, serta berbeda strata sosial. Masing-masing individu dan masing-masing kelompok harus berusaha untuk mengeliminir atau menghilangkan hal yang selalu menjadi embrio atau mendasari terjadinya konflik, yaitu: (a) Prasangka historis, (b) diskriminasi, dan (c) perasaan superioritas *in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain adalah *out-group*".¹⁴ Apabila ketiga hal tersebut tidak mampu dieliminir oleh individu maupun kelompok, maka konflik dan benturan antar individu atau kelompok yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi, politik, ideologi, dan strata sosial serta agama akan menjadi sesuatu yang legal dan lumrah dalam interaksi sosial, karena keringnya nilai-nilai kemanusiaan (humanis), keringnya nilai-nilai "kearifan sosial", keringnya nilai-nilai "kearifan budaya" dan keringnya nilai-nilai "kearifan moral" dalam relasi antarsesama manusia baik secara

¹⁴Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural* (Surakarta: Muhammadiyah University Press), h. 147.

individu maupun kelompok.

2. Tujuan dan Strategi Pendidikan Multikultural

Dalam konsep pendidikan multikultural, fokus dari pendidikan multikultural tidak lagi diarahkan semata-mata pada kelompok rasial, agama, dan kultural domain atau mainstream. Fokus demikian ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap “peduli” dan mau mengerti terhadap perbedaan (*difference*) atau “(*politic of recognition*)” politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas. Lebih singkatnya, tujuan inti dari subjek pendidikan multikultural adalah untuk mencapai pemberdayaan (*empowerment*) bagi kelompok-kelompok minoritas dan *disadvantaged*.

Bagian terpenting dari pada pendidikan multikultural adalah bagaimana menumbuhkan sensitivitas peserta didik akan kebudayaan, budaya masyarakat yang bersifat plural? Dengan bahasa lain, bagaimana orang-orang dapat belajar tentang berbagai macam alternatif untuk mempersepsi, berperilaku, dan mengevaluasi kelompok lainnya sehingga mereka dapat menyesuaikan kepada multikultur yang diperlukan untuk kesejahteraan bersama, tanpa melakukan pengurangan penerimaan akan etnisitasnya sendiri yang orisinal.

Menurut Tilaar, pendidikan multikultural biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: (a) tujuannya membentuk “manusia budaya” dan menciptakan “masyarakat berbudaya (berperadaban)”; (b) materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis (*cultural*); (c) metodenya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis (multikulturalis); dan (d) evaluasinya ditentukan pada

penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.¹⁵

Dalam konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. dan yang terpenting dari strategi pendidikan multikultural ini tidak hanya bertujuan agar supaya siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokrasi.

Secara lebih operasional, Judith H. Kazt, sebagaimana kutip Ardiansyah, menyatakan ada empat tujuan pendidikan multikultural, yaitu: (1) Memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik guna mengenalkan secara kritis kemampuan evaluasi untuk melawan isu-isu seperti realisme, demokrasi, partisipatory, dan exime. (2) Mengembangkan keterampilan peserta didik untuk klarifikasi nilai, termasuk kajian untuk mentransmisikan nilai-nilai yang laten dan manifes. (3) Menguji dinamika keberagaman budaya dan implikasinya kepada strategi pembelajaran guru. Dan (4) mengkaji variasi kebahasaan dan keberagaman gaya belajar peserta didik sebagai dasar bagi pengembangan strategi pembelajaran yang sesuai.¹⁶

Agar berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yakni memberikan perspektif multikultural kepada para peserta didik, ada beberapa strategi yang harus dilakukan dalam konteks pendidikan multikultural, antara lain: Belajar bagaimana dan di mana menentukan tujuan, informasi yang akurat tentang kelompok-kelompok kultur yang beragam; mengidentifikasi aspek-aspek positif individu atau kelompok etnik yang berbeda; belajar toleran untuk keberagaman melalui eksperimentasi di dalam sekolah dan kelas dengan praktek-praktek dan kebiasaan yang berlainan; mengembangkanlah perilaku-perilaku yang empatik

¹⁵ H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 59.

¹⁶ Muhammad Asrori Ardiansyah, "Konsep Pendidikan Multikultural", <http://alumnigontor.blogspot.com/2008/04/konsep-pendidikan-multi-kultural.html>. (Diakses 2 Maret 2012).

melalui bermain peran (*role playing*) dan simulasi; menerapkan penggunaan “*perpective glasses*”, yakni melihat suatu even babakan sejarah, atau isu-isu melalui perspektif kelompok budaya atau lainnya; mengembangkan rasa penghargaan diri (*self-esteem*) seluruh peserta didik; mengidentifikasi dan analisis stereotip budaya; dan mengidentifikasi semua kasus diskriminasi serta prasangka sosial yang berasal dari kehidupan peserta didik sehari-hari.¹⁷

3. Model dan Pendekatan Pendidikan Multikultural

Ada beberapa model yang bisa diterapkan dalam praktek pendidikan multikultural. Secara terinci Magsino, sebagaimana kutip Tilaar dalam Sutarno, mengidentifikasi 6 (enam) jenis model pendidikan multikultural.

Pertama, pendidikan untuk “*emergent society*”. Model ini merupakan suatu upaya rekonstruksi dari keaneka-ragaman budaya yang diarahkan kepada terbentuknya budaya nasional. *Kedua*, pendidikan untuk kelompok budaya yang berbeda. Model ini merupakan suatu pendidikan khusus pada anak dari kelompok budaya yang berbeda. Tujuannya adalah memberikan kesempatan yang sama dengan mengurangi perbedaan antara sekolah dan keluarga, atau antara kebudayaan yang dikenalnya di rumah dengan kebudayaan di sekolah. Model ini bertujuan membantu anak untuk menguasai bahasa resmi serta norma dominan dalam masyarakat.

Ketiga, pendidikan untuk memperdalam saling pengertian budaya. Model ini bertujuan untuk memupuk sikap menerima dan apresiasi terhadap kebudayaan kelompok yang berbeda. Model ini merupakan pendekatan liberal pluralis yang melihat perbedaan budaya sebagai hal yang berharga dalam masyarakat. Di dalam kaitan ini Pendidikan Multikultural diarahkan kepada memperkuat keadilan sosial dengan menentang berbagai jenis diskriminasi dan etnosentrisme.

Keempat, pendidikan akomodasi kebudayaan. Tujuan

¹⁷ P.H. Martorella, *Social studies for elementary school children* (New York: Macmillan, 1994), p. 16.

model ini adalah mempertegas adanya kesamaan dari kelompok yang bermacam-macam. Mengakui adanya partikularisme dengan tetap mempertahankan kurikulum dominan. *Kelima*, pendidikan “*accomodation and reservation*” yang berusaha untuk memelihara nilai-nilai kebudayaan dan identitas kelompok yang terancam kepunahan.

Terakhir, pendidikan multikultural yang bertujuan untuk adaptasi serta pendidikan untuk memelihara kompetensi bikultural. Model ini mengatasi pendekatan kelompok spesifik, identifikasi dan mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi secara *cross-cultural* dengan mendapatkan pengetahuan tentang bahasa atau kebudayaan yang lain.¹⁸

Untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia perlu memakai kombinasi model yang ada, seperti yang dikemukakan Gorski, pendidikan multikultural dapat mencakup tiga jenis transformasi, yaitu: (a) transformasi diri, (b) transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, dan (c) transformasi masyarakat.¹⁹

Dalam konteks teoritis, belajar dari model-model pendidikan multikultural yang pernah ada dan sedang dikembangkan oleh negara-negara maju, dikenal lima pendekatan: *Pertama*, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau multikulturalisme. *Kedua*, pendidikan mengenai perbedaan-perbedaan kebudayaan atau pemahaman budaya, *ketiga*, pendidikan bagi pluralisme kebudayaan, *keempat*, pendidikan dwi budaya, dan *kelima*, pendidikan multikultural sebagai pengalaman moral manusia.

D. Problem Kelompok Minoritas di Indonesia

Definisi mengenai kelompok minoritas sampai saat ini belum dapat diterima secara universal. Namun demikian yang lazim digunakan dalam suatu negara, kelompok minoritas adalah

¹⁸ Sutarno, *Pendidikan Multikultural* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007), Unit 3, h. 11.

¹⁹Muhaemin el-Ma'hady, “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural (Sebuah Kajian Awal)” <http://artikel.us/muhaemin6-04.html>. (Diakses tanggal 25 April 2012).

kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk. Minoritas sebagai ‘kelompok’ yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang tidak dominan. Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa dan strata sosial yang berbeda dengan populasi lainnya dan menunjukkan setidaknya secara implisit sikap solidaritas yang ditujukan pada melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa.²⁰

Bisa juga diartikan bahwa kelompok minoritas merupakan orang-orang yang karena asal-usul keturunannya atau ciri fisik tubuhnya dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlakukan secara tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat dimana mereka hidup. Karena itu mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi.²¹

Mengacu pada dua usulan definisi minoritas, beberapa hal akan mengganggu pikiran kita. *Pertama*, dalam kedua definisi tersebut minoritas pertama-tama ditunjukkan oleh perbandingan numeriknya dengan sisa populasi yang lebih besar. Artinya, sebuah kelompok bisa disebut minoritas kalau jumlahnya signifikan lebih kecil dari sisa populasi lainnya dalam sebuah negara.

Kedua, minoritas mengandaikan sebuah posisi yang tidak dominant dalam konteks sebuah negara, tapi frase “tidak dominan” tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Artinya pengandaian tersebut juga menuntut pengandaian lain: bahwa terma “dominan” bisa dipahami sebagai sebuah makna tunggal yang melingkupi seluruh sector kehidupan sosial. *Ketiga*, menjadi minoritas juga mengandaikan terdapatnya perbedaan salah satu atau semuanya

²⁰ Iskandar Hosein, “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Makalah* dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun 2003, Denpasar Bali, 14-18 Juli 2003.

²¹ Parsudi Suparlan, “Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multikultural, dan Minoritas:Memperjuangkan Hak-hak Minoritas”, *Makalah* dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia?, Wisma PKBI, 10 Agustus 2004. Tersedia dalam http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/masyarakat_majemuk.html. (Diakses tanggal 8 Maret 2012).

dari tiga wilayah, yakni etnik, agama, dan linguistik, dengan sisa populasi lainnya. *Keempat*, menjadi minoritas mengharuskan orang atau kelompok orang memiliki rasa solidaritas antar sesamanya, dan membagi bersama keinginan untuk melestarikan agama, bahasa, tradisi, budaya dan kepentingan untuk meraih persamaan di depan hukum dengan populasi di luarnya.²²

Sehubungan dengan hal tersebut, permasalahan yang dihadapi di berbagai daerah Indonesia adalah masih banyak diskriminasi terhadap kelompok minoritas baik etnis maupun agama, maupun strata sosial, padahal mereka sebagai masyarakat atau suku bangsa harus diberlakukan sama dengan kelompok mayoritas lainnya.

Keberadaan kelompok minoritas selalu dalam kaitan dan pertentangannya dengan kelompok dominan, yaitu mereka yang menikmati status sosial tinggi dan sejumlah keistimewaan yang banyak. Mereka ini mengembangkan seperangkat prasangka terhadap golongan minoritas yang ada dalam masyarakatnya. Prasangka ini berkembang berdasarkan adanya (a) perasaan superioritas dari kelompok yang dominan, (b) sebuah perasaan yang secara intrinsik ada dalam keyakinan mereka bahwa golongan minoritas yang rendah derajatnya itu adalah berbeda dari mereka dan tergolong sebagai orang asing, dan (c) adanya klaim pada golongan dominan bahwa sebagai akses sumber daya yang ada merupakan hak mereka, dan disertai adanya ketakutan bahwa mereka yang tergolong minoritas dan rendah derajatnya itu akan mengambil sumber daya tersebut.²³

Di Indonesia praktek diskriminasi terhadap kaum minoritas yang dilakukan oleh kaum mayoritas masih menjadi masalah aktual. James Danandjaya, Guru Besar UI, mencatat diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia terjadi

²² Hikmat Budiman (ed), *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Interseksi, 2007), h. 13

²³Poerwanti Hadi Pratiwi, "Multikultur Dalam *Ethnic* dan *Cultural Groups*", *Makalah* pada Diskusi Pendalaman Materi Sosiologi, kerjasama antara Prodi Pendidikan Sosiologi FISE UNY dan MGMP Sosiologi Kabupaten Blora, 31 Mei 2010. Diakses dari http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/MASYARAKAT%20%20MULTIKULTURAL_0.pdf. (Diakses tanggal 10 Maret 2012).

pada minoritas berbasis suku bangsa (etnis), kelompok agama, dan kelompok gender seperti kaum perempuan dan kaum homo seksual (baik gay maupun lesbian). Hal ini terjadi sejak zaman kolonial Belanda, lalu dilanjutkan oleh rezim Orde Lama, dan mencapai puncaknya pada masa Orde Baru, bahkan hingga era reformasi.²⁴

E. Signifikansi Pendidikan Multikultural bagi Kelompok Minoritas

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk berpotensi memicu benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Achmadiyah, dan sebagainya telah menyadarkan kita bahwa kalau hal ini terus dibiarkan maka sangat memungkinkan untuk terciptanya disintegrasi bangsa. Syafri Sairin, antropolog UGM memetakan akar-akar konflik dalam masyarakat plural adalah: (a) perebutan sumber daya, alat-alat produksidan kesempatan ekonomi (*access to economic resources and to means of production*); (b) perluasan batas-batas sosial budaya (*social and cultural borderline expansion*); dan (c) benturan-benturan kepentingan politik dan agama (*conflict of political, ideologi, and religious interest*).²⁵

Dalam kondisi ini, dipandang sangat penting memberikan porsi pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia terutama agar peserta didik memiliki kepekaan dalam menghadapi gejala-gejala dan masalah-masalah sosial yang berakar pada perbedaan karena suku, ras, strata sosial, agama dan tata nilai yang terjadi pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dapat diimplementasikan baik pada substansi maupun model pembelajaran yang mengakui dan menghormati keanekaragaman

²⁴ Lebih lanjut lihat James Danandjaya, "Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera", [http:// www. lfip. org/ english/ pdf/ bali-seminar/ diskriminasi%20terhadap%20minoritas%20-%20james%20danandjaja.pdf](http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/diskriminasi%20terhadap%20minoritas%20-%20james%20danandjaja.pdf). (Diakses tanggal 20 Maret 2012).

²⁵Syafri Sairin, *Telaah Pengelolaan Keresarian Sosial dari Literature Luar Negeri dan Hasil Penelitian Indonesia* (Jakarta: Kemeneg KLH dan UGM, 1992), h. 66.

budaya.²⁶

Penambahan informasi tentang keragaman budaya merupakan model pendidikan multikultural yang mencakup revisi kurikulum atas materi pembelajaran, termasuk revisi buku-buku teks. Di Indonesia masih diperlukan usaha panjang dalam merevisi buku-buku teks agar mengakomodasi kontribusi dan partisipasi yang lebih inklusif bagi warga dari berbagai latarbelakang dalam pembentukan multikultural Indonesia. Bangsa Indonesia juga memerlukan materi pembelajaran yang bisa mengatasi “dendam sejarah” di berbagai wilayah.

Pengintegrasian nilai-nilai dan kurikulum pendidikan multikultural dalam sistem pendidikan nasional memiliki urgensi dan signifikansi besar bagi pengembangan keharmonisan dan pemeliharaan semangat Bhineka Tunggal Ika, terutama bagi upaya perlindungan bagi hak-hak kaum minoritas. Penelitian Rini Hanipah Muslimah menunjukkan, urgensi pengintegrasian nilai-nilai pendidikan multikultural dalam teks mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik, supaya siswa tidak tercerabut dari akar budaya, upaya untuk membangun sikap sensitif gender, membangun sikap anti diskriminasi etnis di sekolah, membangun sikap toleransi terhadap keberagaman inklusif, dan sebagai upaya minimalisasi konflik kepentingan.²⁷

Secara elaboratif, signifikansi pendidikan multikultural bagi kelompok minoritas dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Sebagai Sarana Alternatif Pemecahan Konflik.

Pelaksanaan pemberian pendidikan multikultural di lembaga pendidikan diyakini menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmoni yang terjadi di dalam masyarakat, sebagai salah satu *side effect* dari kepluralisme masyarakatnya. Karena, *pertama*, pendidikan multikultural mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam

²⁶Tilaar, *Multikulturalisme*, h. 123.

²⁷Rina Hanipah Muslimah, “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural dalam Teks Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Kelas X”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

kebhinnekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerja sama dengan yang lain. *Kedua*, melalui pendidikan multikultural yang menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinnekaan dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, akan meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik secara damai dan tanpa kekerasan.

Dengan demikian pelaksanaan pendidikan multikultural dapat dikategorikan berhasil bilamana didalam diri peserta didik terbentuk sikap hidup saling menghargai, saling toleransi, tidak bermusuhan dikarenakan perbedaan budaya, ras, etnik, agama dan strata sosial, serta tradisi.

2. Sebagai Upaya agar Siswa Tidak Tercerabut dari Akar Budaya

Dalam era globalisasi masuknya budaya asing yang sangat bertentangan dengan budaya masyarakat Indonesia merupakan ancaman yang sangat serius bagi peserta didik. Karena berbagai budaya saat ini berbaur dengan banyak budaya asing yang semakin mudah didapatkan melalui beragam media, seperti televisi, internet dan sebagainya sebagai dampak dari kemajuan zaman, kecanggihan teknologi mempersingkat jarak sehingga memudahkan persentuhan antar budaya.

Untuk mensikapi realitas globalisasi tersebut, perlu adanya antisipasi, sebagai solusi konkrit, antara lain dengan cara peserta didik haruslah diberi penyadaran akan pengetahuan yang beraneka ragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas mengenai pengetahuan global, termasuk salah satu diantaranya aspek kebudayaan. Dikarenakan beragamnya budaya di dalam maupun di luar negeri, maka peserta didik dan mahasiswa sangat perlu diberi materi mengenai pemahaman multibudaya atau pendidikan multikultural agar para peserta didik tidak kehilangan arah dan tidak tercerabut dari akar budayanya.

3. Sebagai Landasan Pengembangan Kurikulum Nasional

Kurikulum merupakan acuan utama dalam pelaksanaan pembelajaran, yang akan memberikan sejumlah materi dan

isi pelajaran yang memerlukan pengembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam melaksanakan pengembangan kurikulum masa depan yang berdasarkan pendekatan multikultural dapat dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah berikut,

Pertama, mengubah filosofi kurikulum dari yang berlaku seragam seperti sekarang ini kepada filosofi yang lebih sesuai dengan tujuan dan misi serta fungsi setiap jenjang dan unit pendidikan. Filosofi konservatif seperti esensialisme dan perenialisme (pada tingkat pendidikan dasar) haruslah dirubah ke filosofi yang lebih menekankan pendidikan sebagai upaya mengembangkan kemampuan humanisme peserta didik, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat.

Kedua, teori kurikulum tentang konten/*curriculum content*, haruslah berubah dari teori yang mengartikan konten sebagai aspek substantif yang memuat fakta, teori, generalisasi kepada pengertian yang juga mencakup nilai moral, prosedur, proses dan skills yang harus dimiliki peserta didik.

Ketiga, teori belajar yang digunakan dalam kurikulum masa depan, yang memperhatikan keragaman SOSEKBUD dan politik tidak boleh hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang memposisikan peserta didik sebagai makhluk sosial, budaya, politik yang hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa yang harus diseragamkan oleh institusi pendidikan.

Keempat, proses belajar yang mengandalkan peserta didik belajar secara individualistis dan bersaing secara kompetitif individualistis harus ditinggalkan dan diganti dengan metode belajar kelompok dan bersaing secara kelompok dalam situasi positif. *Kelima*, evaluasi yang digunakan haruslah meliputi keseluruhan aspek kemampuan dan kepribadian peserta didik, sesuai dengan tujuan dan konten yang dikembangkan.²⁸

Mengingat bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak budaya, ras, suku, agama, dan kepercayaan, penerapan pembelajaran pendidikan multikultural sangat penting untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik dan diskriminasi terhadap kaum minoritas yang terjadi di beberapa daerah. Pembelajaran

²⁸ Choirul Mahpud, *Pendidikan Multikultural*, h. 222-224.

multikultural bisa menanamkan sekaligus mengubah pemikiran peserta didik untuk benar-benar tulus menghargai keberagaman etnis, agama, ras, dan antargolongan.

Melalui pembelajaran berbasis multikultural, sikap dan *mindset* (pemikiran) peserta didik akan lebih terbuka untuk memahami dan menghargai keberagaman. Hal ini penting untuk menghapuskan praktek diskriminasi. Dengan pembelajaran multikultural para lulusan akan dapat memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan menyelesaikan segala problem kehidupannya. Beberapa keuntungan pendidikan multikultural, pendidikan multikultural merupakan sebuah proses dimana seseorang mengembangkan kompetensi dalam beberapa sistem standar untuk mempersepsi, meyakini, dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari.

G. Penutup

Dari uraian di atas, diharapkan gagasan dan konsep pendidikan multikultural dapat merekonstruksi kembali "kebudayaan nasional Indonesia" yang terdiri dari beragam etnis, suku bangsa, budaya dan agama serta strata sosial, sebagai kenyataan yang tak dapat ditolak dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan multikulturalisme diharapkan dapat mengubah "paradigma monokultural" yang penuh dengan prasangka dan diskriminatif ke paradigma multikulturalisme yang menghargai perbedaan, keragaman, toleransi dan sikap terbuka, membangun masyarakat yang berperadaban, toleransi terhadap sesama manusia, mandiri dan mampu mengatur diri sendiri, bebas dari paksaan, ancaman dan kekerasan untuk menuju dan tercipta masyarakat baru Indonesia, dimana kelompok minoritas dapat menikmati pendidikan yang mereka cita-citakan tanpa ada perbedaan sedikitpun dari kelompok mayoritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amini, Ernie Isis Aisyah, *Analisis Kebutuhan Pendidikan Multikultural Berbasis Kompetensi pada Siswa SLTP di Kota Mataram*, Mataram: Program Pascasarjana IKIP Negeri Singaraja, 2004.
- Ardiansyah, Muhammad Asrori, “Konsep Pendidikan Multikultural”, <http://alumnigontor.blogspot.com/2008/04/konsep-pendidikan-multikultural.html>. Diakses 2 Maret 2012.
- Atmadja, Nengah Bawa, “Multikulturalisme dalam Perspektif Filsafat Hindu”, *Makalah* pada Seminar Damai Dalam Perbedaan, Singaraja, 5 Maret 2003
- Azra, Azyumardi, “Identitas dan Krisis Budaya, Membangun Multikulturalisme Indonesia”, <http://www.kongres.budpar.go.id/agenda/precongress/makalah/abstrak/58%20azyumardi%20azra.htm>. Diakses 20 April 2012.
- Budiman, Hikmat (ed), *Hak Minoritas: Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Interseksi, 2007.
- Hosein, Iskandar, “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Makalah* dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tahun 2003, Denpasar Bali, 14-18 Juli 2003.
- James Danandjaya, “Diskriminasi Terhadap Minoritas Masih Merupakan Masalah Aktual di Indonesia Sehingga Perlu Ditanggulangi Segera”, <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/diskriminasi%20terhadap%20minoritas%20-%20james%20danandjaya.pdf>. Diakses 20 Maret 2012.
- el-Ma’hady, Muhaemin, “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural (Sebuah Kajian Awal)”, <http://artikel.us/muhaemin6-04.html>. Diakses 25 April 2012.

- Mahpud, Choirul, *Pendidikan Multikultural*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Maksum, Ali; dan Ruhendi, Luluk Yunan, *Paradigma Pendidikan Universal*, Yogyakarta: IRCICOD, 2004.
- Martorella, P.H., *Social studies for elementary school children*, New York: Macmillan, 1994.
- Muslimah, Rina Hanipah, "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Teks Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Kelas X", *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Pelly, Usman, *Kualitas Bermasyarakat: Sebuah Studi Peranan Etnis dan Pendidikan dalam Keresasian Sosial*, Medan: Proyek Kerjasama Kantor Meneg KLH-IKIP Medan, 1988.
- Pratiwi, Poerwanti Hadi, "Multikultur Dalam *Ethnic dan Cultural Groups*". *Makalah* pada Diskusi Pendalaman Materi Sosiologi, kerjasama antara Prodi Pendidikan Sosiologi FISE UNY dan MGMP Sosiologi Kabupaten Blora, 31 Mei 2010. Diakses dari http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/MASYARAKAT%20%20MULTIKULTURAL_0.pdf. Diakses 10 Maret 2012.
- Purwasito, Andrik, *Komunikasi Multikultural*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sairin, Syafri, *Telaah Pengelolaan Keresasian Sosial dari Literature Luar Negeri dan Hasil Penelitian Indonesia*, Jakarta: Meneg KLH dan UGM, 1992.
- Suparlan, Parsudi, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multi-kultural", *Makalah* dalam Symposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3. Universitas Udayana Denpasar Bali, 2002.
- Suparlan, Parsudi, "Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multi-kultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas", *Makalah* dalam Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia?, Wisma PKBI, 10 Agustus 2004.

Tersedia dalam http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/masyarakat_majemuk.html. Diakses 8 Maret 2012.

Sutarno, *Pendidikan Multikultural*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007.

Tilaar, H.A.R, *Multikulturalisme Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Grasindo, 2004.

Yaqin, M. Ainul, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Under Standing untuk Demokrasi dan Keadilan*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.